

**NU, SOEKARNO DAN *STAAT ISLAM*:
WACANA NEGARA ISLAM DALAM *BERITA
NAHDLATOEL OELAMA (BNO)***

Muhammad Ainun Najib

IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: jib_30@yahoo.com

Abstract

Islamic state once became the central discourse in the ideological debate of the state before and several years after Indonesian independence. Even the discourse of Islamic state has not yet been resolved until now. As one of the religious organizations, in the historical record, Nahdlatul Ulama (NU) was actually supporting the establishment of an Islamic state in Indonesia. Informed from Bi-weekly News of Nahdlatoel Oelama (BNO) published between June 1 to October 15, 1940, NU believed that Islam covers the issue of religion and the world, including politics. Therefore, they rejected Soekarno's secularism discourse. As a traditionalist Islamic groups, NU involved in the polemics of the state ideology which was often narrated merely by modernist Islamic groups.

Keywords: *Wacana Negara Islam, NU, Soekarno*

PENDAHULUAN

Al-Islam din wa daulah merupakan tema wacana politik keagamaan yang kontroversial dan tidak berkesudahan. Konsep *al-Islam din wa daulah* meniscayakan keyakinan bahwa dalam Islam terkandung sepera ideologi dan

konsep kenegaraan.¹ Wacana manifestasi Islam ditentukan politik kontekstual serta terwujud dalam keragaman sikap dan perumusan ideologis.² Keragaman ideologi negara Islam terlihat dalam pelbagai terminologi, seperti *dar al-Islam* dan *al-Khilafah al-Islamiyah*.

Kuntowijoyo membagi sejarah Islam Indonesia dalam tiga zaman: zaman mitos, zaman ideologis, dan zaman ilmu.³ Setiap zaman mempunyai profil dan cara tersendiri menghadapi persoalan yang terjadi. Zaman mitos ditandai penantian Islam Indonesia terhadap Ratu Adil yang menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan. Profil zaman mitos tampak dalam sosok Tjokroaminoto yang kadang kala diyakini sebagai jimat.⁴

Zaman ideologis menandai babak sejarah umat Islam Indonesia mempercayai bahwa Islam mampu mengatasi segala problem kehidupan, termasuk problem kenegaraan dan politik. Pertentangan ideologi Islam dengan sekularisme membunyah. Salah satu tokoh zaman ini adalah Moh. Natsir.⁵ Akan tetapi, Moh. Natsir bukanlah satu-satunya representasi zaman ideologis. Hampir mayoritas Islam Indonesia menganggap Islam sebagai solusi atas segala problem kenegaraan dan kebangsaan. Beranjak dari zaman mitos dan ideologis, Islam Indonesia diserbu zaman ilmu pengetahuan yang ditandai dengan objektivikasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Taufik Abdullah memandang tahun 1920-an hingga tahun 1940-an sebagai dasawarsa ideologi. Strategi dan ideologi dirumuskan serta diperdebatkan. Kelompok nasionalisme Islam dan nasionalisme sekular berlawanan secara diametral.⁶ Sebelum itu tahun 1918, bermula dari sebuah harian berbahasa Jawa yang terbit di Solo menampilkan artikel

¹ Samsu Rizal Pangabean, "Din, Dunia dan Daulah" dalam Taufik Abdullah, dkk (ed.), *Ensiklopedi Islam Tematis: Dinamika Masa Kini* Jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), h. 45.

² Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 5.

³ Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, cet II (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1994), h. 29.

⁴ MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* terj. Dharmono Hardjowidjono Cet. IV (Yogyakarta: UGM Press, 1994), h. 253.

⁵ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 74.

⁶ Abdullah, *Islam...*, h. 5

Martodharsono dan Djojodikoro tertanggal 9 dan 11 Januari 1918. Kedua penulis itu menyebut Nabi Muhammad sebagai “pemabuk” dan “penghisap candu.”⁷

Artikel tersebut memancing kemarahan Islam Indonesia. Sebuah rapat umum diadakan di Surabaya. Semua peserta marah besar terhadap dua penulis artikel dan redaktur harian tersebut. Bahkan, mereka menuntut pemerintah Hindia Belanda untuk menangkap orang yang terlibat dalam dua artikel tersebut. Sebab, keamanan dan ketertiban sosial terganggu.

Reaksi lain terhadap tulisan Nabi Muhammad “pemabuk” dan “penghisap candu” adalah terbentuknya Panitia Tentara Nabi Muhammad yang bertujuan “mencari pesatuan lahir dan batin antara segenap kaum Muslimin, terutama di Hindia Belanda” dan “untuk menjaga kehormatan Nabi Muhammad... dan kehormatan kaum Muslimin”.⁸ Panitia Tentara Nabi Muhammad yang digerakkan pemimpin Sarekat Islam berdiri di seluruh Indonesia.

Kelahiran Panitia Tentara Nabi Muhammad ternyata memantik reaksi Panitia Nasionalisme Jawa (*Committee voor het Javaanasche Nasionalism*) yang berdiri tahun 1914.⁹ Panitia Nasionalisme Jawa memahami kecaman umat Islam terhadap harian *Djadwi Hisworo*. Namun, itu terlalu berlebihan karena kedua penulis artikel tidak terkenal dan oplah *Djawi Hisworo* yang kecil. Panitia Nasionalisme Jawa justru memandang agama Islam sebagai agama Arab, serta persoalan agama dan politik harus dipisahkan.¹⁰

Wacana pemisahan agama dan politik yang dilontarkan Panitia Nasionalisme Jawa menandai awal perdebatan ideologis nasionalisme Islam *vis a vis* nasionalisme sekular dalam sejarah Indonesia modern. Nasionalisme Islam diwakili Sarekat Islam. SI menjunjung *nasionalistisch islamitisch* yang memandang kesatuan agama dan politik.¹¹ Di sisi lain, nasionalisme sekular

⁷ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 123.

⁸ Dikutip dari Noer, *Gerakan....*, h. 143.

⁹ Ricklefs, *Sejarah...*, h. 268.

¹⁰ Noer, *Gerakan....*, h. 144.

¹¹ *Ibid.*

direpresentasikan Panitia Nasionalisme Jawa dan Panitia Nasionalisme Hindia.

Dalam wacana nasionalisme, dua tokoh perjuangan yang terlibat dalam perdebatan panjang adalah Soekarno dan Agus Salim. Soekarno mengintrodusir paham kebangsaan yang dilandaskan semangat cinta tanah air, bukan pada agama. Agus Salim, salah satu tokoh SI, menentang keras ide tersebut. Islam, menurutnya, tidak anti cinta tanah air, namun khawatir cinta tersebut menjadi ‘berhala’ baru; mensekutukan Tuhan dalam mencintaiNya sekaligus cinta dengan obsesi kepada benda. Agus Salim justru menawarkan nasionalisme Islam yang tidak didasarkan atas teritorial tertentu, melainkan pada *li Allah ta’ala*.¹² Soekarno menolak perspektif Agus Salim terhadap nasionalisme itu. Cinta tanah air, bantah Soekarno, tumbuh dari “pengetahuan atas susunan dan riwayat dunia; ia bukan *jingo* nasionalisme atau chauvisme; dan bukan suatu *copy* atau tiruan daripada nasionalisme Barat”.¹³

Harian *Swara Oemoem* tahun 1930 di bawah pimpinan Sutomo menurunkan tulisan perbandingan antara orang yang berhaji dan tahanan Digul. Menunaikan haji sekadar menghamburkan harta dan membuat badan kepayahan serta tidak ada implikasi bagi perjuangan bangsa. Ka’bah adalah berhala bagi Arab. Sebaliknya, tahanan Digul ditempa untuk semakin patriot dalam perjuangan. Maka, menjadi tahanan Digul lebih utama ketimbang menunaikan haji.¹⁴

Tulisan yang menghina sakralitas haji dan Ka’bah sekaligus mempertanyakan kontribusi Islam bagi perjuangan kemerdekaan tersebut direspons secara ideologis oleh A. Hassan. Islam, bagi A. Hassan, mampu mengatasi persoalan politik, ekonomi dan pelbagai persoalan lain. Perjuangan melawan penjajah menemui kegagalan bila Islam dipinggirkan. Islam tidak melarang mencintai bangsa. Tetapi, cinta bangsa akan menjerumuskan dalam

¹² Kahfi Haryanti, *Agus Salim and Nationalist in Indonesia during Early Twenty Century*, (Jakarta: Logos, 2001), h. 72.

¹³ Dikutip dari Noer, *Gerakan...*, h. 276.

¹⁴ Howard M. Federsiepiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad 20*, terj. Yudian W Aswin dan Affandi Mochtar (Yogyakarta: UGM Press, 1996), h. 115.

kubangan *ashabiyah*.¹⁵

Setali tiga uang, tokoh Islam modernis lain, Moh. Natsir mengemukakan bahwa Islam bisa menjadi dasar nasionalisme Indonesia. Islam menawarkan nasionalisme tidak karena kebendaan, melainkan cinta yang transendental.¹⁶ Azyumardi Azra menyebut bahwa Islam menjadi salah satu unsur *genuine* munculnya nasionalisme Indonesia.¹⁷

Dalam banyak narasi sejarah polemik Islam dan politik sebelum kemerdekaan acapkali ditulis semata melibatkan kelompok Islam modernis. Nama seperti Agus Salim, A. Hasan, dan Moh. Natsir menghiasi babak sejarah zaman ideologi Islam Indonesia. Sebaliknya, Islam tradisional seakan tidak punya kontribusi dalam polemik tersebut. Padahal, bila jeli membaca bukti-bukti sejarah, Nahdlatul Ulama melalui *Berita Nahdlatul Ulama* terlibat dalam polemik negara Islam sekaligus mendukung berdirinya negara Islam di Indonesia. Namun, sekalipun menentang sekularisme, NU justru menganggap Soekarno merupakan sosok yang tepat memimpin negeri yang akan memproklamkan kemerdekaannya itu.

Soekarno: Memisahkan Agama dari Negara

Polemik negara Islam tahun 1940 bermula dari Soekarno yang menulis serangkaian artikel *Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara* (20 dan 27 Mei; 10, 17 dan 24 Juni; serta 1 Juli 1940) dan *Saya Kurang Dinamis* (22 Juli 1940). Sebelum menuliskan artikel tersebut, Soekarno menuliskan semacam artikel pengantar, yaitu *Memudahkan Pengertian Islam* (25 Maret; 1, 7 dan 15 April 1940) dan *Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara* (22 April 1940).

Soekarno dalam artikel *Memudahkan Pengertian Islam* mencoba mempertanyakan paham keislaman yang bersemayam dalam pikiran umat Islam Indonesia. Dengan gamblang, Soekarno menyatakan urgensi

¹⁵ Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 31-37.

¹⁶ Noer, *Gerakan...*, h. 280.

¹⁷ Azyumardi Azra, "Antara Kesetiaan dan Perbenturan" *Jurnal Kalam* edisi 3 tahun 1994, h. 45.

“memikirkan kembali kita punya pengertian tentang Islam, menyelidiki apakah sudah benar kita punya paham-paham tentang Islam, dan apakah tidak ada paham-paham yang perlu dikoreksi”¹⁸

Gugatan Soekarno secara eksplisit ditujukan kepada golongan yang disebutnya *Kaum Tua* yang menolak *ijtihad* dalam beragama. Dalam artikel tersebut Soekarno juga menumpahkan kekesalannya terhadap tuduhan *Kaum Muda* tidak antusias dalam beragama karena mereka memperoleh pendidikan anti-agama. Padahal, menurut Soekarno, persoalannya tidak sederhana itu. Keenganan *Kaum Muda* terhadap agama Islam disebabkan Islam mengalami kejumudan.¹⁹

Fachry Ali menyatakan Soekarno memakai pendekatan sejarah untuk membangun idenya dan menganalisa Islam Indonesia.²⁰ Pendekatan sejarah terlihat dalam artikel *Memudakan Pengertian Islam*. Soekarno mendeskripsikan kondisi Islam di beberapa negara Islam seperti Turki, Mesir, Palestina, India, dan Arab. Di negara-negara tersebut, Islam temanifestasikan dalam keragaman. Tidak ada Islam yang monolitik dan tunggal.

Kejumudan Islam, saran Soekarno, dapat diatasi dengan mengelorakan kembali rasionalisme Islam yang dicontohkan Mu'tazilah. Sekalipun terdapat gerakan Islam modern yang mengusung rasionalitas di Indonesia, “tetapi interpretasi al-Qur'an dan Hadits itu; cara menerangkan al-Qur'an dan Hadits itu, belumlah rasionalitas 100%; belumlah selamanya dengan bantuan akal 100%.”²¹

Matinya rasionalitas dalam Islam membawa dampak buruk bagi Islam itu sendiri. Salah satu faktor yang memasung rasionalitas Islam adalah kitab fikih. Secara retorik, Soekarno mengajukan pertanyaan, mengapa mempetahankan kitab-kitab fikih yang diproduksi beribu-ribu tahun serta dalam konteks masyarakat yang berbeda? Kitab fikih ‘kuno’ akan membawa

¹⁸ Soekarno, “Memudakan Pengertian Islam” dalam *Di Bawah Bendera Revolusi* jilid I cet. III (Jakarta: Panitia Penerbit DBR, 1964), h. 350

¹⁹ *Ibid.*, h. 372.

²⁰ Fachry Ali, “Meneruskan Polemik Islam Soekarno” pengantar dalam Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme* (Jakarta: Logos, 1999), h. ix.

²¹ Soekarno, *Di Bawah...*, h. 398.

masyarakat berjalan mundur belakang. Maka, Soekarno mengusulkan “gantilah kita punya fiqh dengan fiqh baru yang sesuai dengan spirit Islam dan sesuai tantangan zaman”.²²

22 April 1940, seminggu setelah terbitnya artikel *Memudahkan Pengertian Islam*, Soekarno menulis artikel *Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara*. Dari judul artikel, Soekarno mengajak Islam Indonesia memikirkan Islam ketika pertama kali didakwahkan Nabi Muhammad dan kondisi masyarakat saat ini. Dalam artikel *Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara*, Soekarno menyeru Islam Indonesia berpikir kembali perihal paham keislaman. Bahkan, Soekarno mengecam sikap Islam sembari menegaskan bahwa “sebenarnya yang kita warisi hanyalah pusaka-pusaka ulama *faqih* yang sedia kala sahaja”.²³ Inilah yang membuat pemikiran keagamaan mengalami kebekuan. Padahal, Islam itu sesuai dengan perkembangan sosial, dan bersifat fleksibel. Agama menjadi sempit dan ‘*menyekek*’ kehidupan karena adanya *ijma*’ (konsensus) ulama.²⁴

Selanjutnya, dalam artikel tersebut Soekarno juga menyinggung persoalan politik Islam yang dipraktikkan Nabi Muhammad dan *al-Khulafau al-Rasyidun*. Menurut Soekarno, sistem politik Nabi Muhammad dan *al-Khulafau al-Rasyidun* telah usang karena terlahir dalam masyarakat unta. Di sisi lain, saat ini adalah masyarakat kapal udara, dan telah diintrodusir sistem politik yang lebih sempurna dan demokratis.²⁵

Sebulan kemudian, 22 Mei 1940, Soekarno menulis artikel secara berkala dengan judul *Apa Sebab Turki Memisah Agama*. Artikel tersebut bermula dari permohonan sahabat-sahabat Soekarno, dan sekadar *verslag* (laporan). Tidak ada tendensi untuk memisahkan agama dari negara. Tetapi, artikel itu mencerminkan ide Soekarno bagi negara yang akan memproklamkan kemerdekaannya.

²² *Ibid.*, h. 300.

²³ Soekarno, “Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara” dalam Soekarno, *Di Bawah*, h. 489.

²⁴ *Ibid.*, h. 488.

²⁵ *Ibid.*, h. 490.

Mengapa memisahkan agama dari negara? Soekarno menggaris bawahi tiga hal sebagai berikut. *Pertama*, agama adalah urusan pribadi. Karena bersifat pribadi, persoalan agama diserahkan kepada masing-masing individual. Soekarno meyakinkan bahwa Turki yang tidak ‘ikut campur’ dalam agama rakyat tidak berarti anti-agama. Dengan mengutip peneliti masalah Turki, Frances Woodsmall, Soekarno memuji kecenderungan baru Islam di Turki. Mereka semakin bersemangat dalam melaksanakan ajaran Islam.²⁶

Negara yang tidak memisahkan agama dari negara adalah negara paradoks. Turki misalnya, sebelum Kemal Attaturk berkuasa, negara Islam itu menampilkan jurang yang menganga antara *recht* (hukum) yang berlaku dengan realitas yang terjadi. “Buat apakah membanggakan mempunyai negara Islam... sabda Allah menjadi *wet* (undang-undang) kalau ekonominya *kocar-kocir*, politiknya anarkhi, keagamaannya *megap-megap*, praktek rumah tangga rakyat bobrok dan busuk?”²⁷

Badri Yatim memandang gagasan sekularisme Soekarno bersifat kontradiktif. Di satu sisi, Soekarno mengkampanyekan ide pemisahan agama dari agama. Namun di sisi lain, Soekarno mengakui ajaran Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan.²⁸ Soekarno mempunyai “keyakinan arti yang sebenarnya dari cita-cita Islam, bahwa negara haruslah bersatu dengan agama.”²⁹

Kedua, tidak ada perintah mendirikan negara Islam. Teks al-Qur’an dan hadith tidak ada satu pun yang mentahankan pendirian negara Islam. Bahkan, dua sumber utama Islam tersebut tidak sama sekali menyebut entitas negara Islam, politik Islam dan lain-lain. Tidak ada pula *ijma*’ ulama perihal negara Islam.³⁰ Referensi utama pendapat Soekarno ini adalah karya Ali ‘Abd al-Raziq, *al Islam wa Usul al Hukum*.

²⁶ Soekarno, “Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara” dalam *Ibid.*, h. 404.

²⁷ *Ibid.*, h. 409.

²⁸ Yatim, *Soekarno...*, h. 142.

²⁹ Soekarno, “Saya Kurang Dinamis” dalam Soekarno, *Di Bawah...*, h. 453.

³⁰ Soekarno, “Apa Sebab”, dalam *Ibid.*, h. 406

Negara Islam termasuk masalah yang diperdebatkan di kalangan Islam. Mengutip ‘Ali ‘Abd al-Raziq, sebagian ulama berpendapat bahwa negara Islam menghilang berbarengan dengan wafatnya Nabi Muhammad. Kekuasaan politik Islam setelah Nabi Muhammad merupakan kekuasaan politik yang tidak terkait dengan Islam. Sebagian ulama menganggap negara Islam mempunyai kesinambungan dengan kekuasaan Nabi Muhammad. Maka, kepatuhan terhadap negara Islam meliputi persoalan agama dan dunia. Sebagian ulama berpendapat bahwa negara Islam tidak terkait dengan agama, tetapi dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan shari’at agama.

Ketiga, penyalahgunaan agama. Soekarno geram dan marah terhadap agama yang dibajak untuk keburukan. Melalui salah satu artikelnya yang berjudul *Islam Sontoloyo*, Soekarno mengecam pemerksosaan yang dilakukan seorang guru agama terhadap siswanya.³¹ Pemerksosaan yang dilakukan oleh seorang guru agama lebih tragis bila dibandingkan pelaku lain. Tragedi tersebut seakan memperkuat pandangan Soekarno bahwa agama sangat mungkin dibajak dan disalahgunakan untuk keburukan.

Artikel *Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara* mempersoalkan tidak ada garis demarkasi hubungan agama dan negara dalam negara Islam. Implikasinya, persoalan yang murni berbau agama akan dianggap sebagai persoalan negara. Pembangkangan terhadap aparaturnegara, *mufti* misalnya, dipandang membangkang kepada agama dan Tuhan. Realitas politik seperti itu, menurut Soekarno, berlangsung sebelum Turki memisahkan agama dari negara. Padahal, agama yang menancapkan dominasinya dalam negara tidak akan membawa kemajuan bagi negara.

Bagi Soekarno pemisahan agama dari negara adalah sebuah pilihan yang harus diambil dan keniscayaan. Soekarno memberikan dua alternatif, yaitu “persatuan negara-agama, tetapi *zonder* (tanpa) demokrasi atau demokrasi, tetapi negara dipisahkan dari agama”.³² Agama yang terpisah dari negara akan berkembang dengan pesat. Sembari mengutip intelektual Turki, Hadib Hanoum, Soekarno menuliskan, “kalau Islam terancam bahaya,

³¹ Soekarno, “Islam Sontoloyo”, dalam *Ibid.*, h. 493

³² Soekarno, “Saya Kurang Dinamis”, dalam *Ibid.*, h. 453

kehilangan pengaruhnya di atas, maka itu bukanlah karena tidak diurus pemerintah, tetapi ialah justru karena diurus pemerintah.”³³

Mendukung Staat Islam

Berita Nahdlatoel Oelama (BNO) yang terbit dwi mingguan mempublikasikan tulisan yang menolak sekularisme Soekarno secara berurutan tanggal 1 dan 15 Juni 1940; 15 Agustus 1940; 1 dan 15 September 1940; serta 1 dan 15 Oktober 1940. KH. Hasyim Asy’ari, KH. A Wahab Hasbullah, dan KH. Bisri Syansuri menjabat *mede redacteurs BNO*. HM Machfoedzh Shiddiq sebagai *directeur hoofdred*. M Jatim Markosim menjabat *adminitratuer*. Sedangkan KH. Elyas Banyu Urip Pekalongan dan KH. Wahid Hasjim bertugas sebagai *redactuer BNO*.

Berdasar sumber sejarah *BNO* yang diperoleh penulis, nama Soekarno disebut 98 kali. Beberapa kali nama Soekarno juga dipanggil dengan sebutan “tuan”. Banyaknya penyebutan nama tersebut menandakan perhatian besar NU terhadap tulisan-tulisan Soekarno. *BNO* mengaitkan Soekarno dalam posisinya sebagai tokoh pergerakan nasional, politisi ulung dan nasionalis ‘netral’ agama. Hanya sekali Soekarno dikaitkan dengan Muhammadiyah.

Secara umum, *BNO* mengecam artikel Soekarno. Judul artikel *Islam Sontoloyo* dan *Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara* misalnya, merendahkan Islam. Tulisan Soekarno tentang Islam mencerminkan orang yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang Islam. *BNO* menyebut tulisan Soekarno *tufayli*, keanak-kanakan. Akibatnya, Islam Indonesia terjangkiti keresahan. Dengan gamblang *BNO* menuliskan, “bahwa kekacauan dalam Islam khususnya, dan di dalam lain-lain alam adalah pertama kalinya karena bercokolnya.... *thufaili*, tamu yang tidak diundang”.³⁴

Artikel Soekarno *Memudahkan Pengertian Islam* serta *Masyarakat Onta dan Masyarkat Kapal Udara* dipandang *BNO* sebagai karya tulis yang ‘baik’. Sebab, Soekarno melihat fleksibelitas dan progresivitas hukum Islam. Namun, lantaran Soekarno tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang

³³ Soekarno, “Apa Sebab”, dalam *Ibid.*, h. 378

³⁴ “Jangan Bicara Kalau tak Tahu”, *BNO* No. 15 tahun 09, 1 Juli 1940, h. 200

hukum Islam, dua artikel tersebut digugat *BNO*. Dengan bahasa yang lugas, *BNO* mengatakan Soekarno “tidak mengerti seluk beluknya syara’ Islam. Maka, maksud tuan (Soekarno, *pen*) yang boleh jadi baik itu merupakan buah dari kebalikannya.”³⁵

Sebagai corong NU, *BNO* berkeyakinan Islam tidak bisa dimudakan sebagai gugatan Soekarno. Islam itu konstan serta dapat diaplikasikan dalam berbagai tempat dan waktu. Karena itu, yang ‘dimudakan’ adalah pemeluk Islam, bukan Islam itu sendiri. *BNO* mengambil contoh riba. Dengan retorik, *BNO* bertanya, apakah hukum haram riba bisa berubah karena perubahan masyarakat? Dalam konteks ini, *BNO* mempertanyakan kualifikasi pemahaman keagamaan Soekarno. Bahkan, menurut *BNO*, pandangan Soekarno terkesan kontradiktif. Di satu sisi, Soekarno mengumandangkan urgensi memudakan Islam. Namun di sisi lain, Soekarno memandang Islam adalah kemajuan.

Dalam rangka menegaskan kemajuan Islam, *BNO* memuat artikel Amir Syakib Arsalan, intelektual Suriah dan anggota Dewan Orientalisme Nasional. Penyunting artikel tersebut membubuhinya nama Soekarno dengan pretensi menyerang ide-idenya. Amir Syakib Arsalan menandakan,

Islam tidak mungkin bertentangan dengan kemajuan. Karena kedatangan Islam adalah untuk kemajuan manusia. Dan Allah tidak menurunkan peraturan kecuali yang memudahkan mereka dan tidak menjadikan agama sebagai sesuatu yang sempit.³⁶

Seperti apologi lain, kemunduran Islam yang dikecam Soekarno bukan disebabkan Islam dan ulama, melainkan sikap umat Islam.

BNO tampaknya kebakaran jenggot ketika Soekarno mengkambinghitamkan fikih dan ulama sebagai biang keladi kemunduran Islam.³⁷ Sebuah pandangan yang hampir serupa dengan gerakan pembaharuan Islam awal abad ke-20. Kemapanan fikih dan posisi sentral ulama dalam Islam membawa dampak buruk bagi kemajuan Islam dan negara. Pandangan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *BNO*, No. 21 tahun 09, 1 September 1940, h. 293.

³⁷ *Ibid.*

Soekarno ini terpengaruh gerakan pembaharuan Islam yang muncul awal abad ke-20. Hegemoni fikih dan kiai dalam Islam memunculkan taklid buta. Akibatnya Islam mengalami kemunduran. *BNO* membantah keras pandangan Soekarno. Kemunduran Islam bukan semata-mata lantaran fikih dan kiai, melainkan belum memenuhi syarat kemajuan umat Islam, seperti ahli ekonomi, hukum, “dan lain-lain dikehendaki oleh sesuatu masyarakat yang berkembang.”³⁸

Soekarno mengandaikan negara maju seperti yang dialami negara Barat. *BNO* menolak indikator kemajuan tersebut. Dengan sinis, *BNO* menilai negara maju karena mengadopsi budaya Barat, seperti dansa, membuang tabir, dan *openbjar*. Kiai yang mengenakan jubah dan surban bukanlah indikator kemunduran sebuah masyarakat. Di ujung artikel *BNO* mengutip Moh. Hatta, “sudah mejadi pembawaan Soekarno bahwa ia selalu memudahkan soal. Sifat itu terpakai benar untuk propaganda, tetapi tidak buat memecah soal yang sulit dengan keterangan”.³⁹

BNO kemudian ‘menyerang’ wacana pemisahan agama dari negara Soekarno. Wacana tersebut menyeruak dari refleksi seseorang yang telah terkontaminasi dengan Barat. Namun, menurut *BNO*, ironisnya pemisahan agama dari negara justru disuarakan dari balik tabir Islam. Soekarno seakan-akan mempunyai pemahaman keislaman yang memadai. Padahal, Soekarno sebenarnya tidak memahami Islam dengan baik karena kualifikasinya terhadap Bahasa Arab tidak mumpuni “sehingga tidak dapat membaca dan mempelajari soal-soal keislaman.”⁴⁰

Karena itu, *BNO* menduga ada dua kemungkinan *verslag* itu ditulis Soekarno. *Pertama*, Soekarno melakukan kebohongan dengan memanipulasi fakta yang terkait pemisahan Islam dari negara Turki. Soekarno dipandang tidak adil karena tidak mengungkapkan secara detail sebab sebenarnya Turki memisahkan agama dari negara.⁴¹ *Kedua*, Soekarno menjadi korban buku

³⁸ “Ir. Soekarno in Actie”, *BNO*, No 16 tahun 09, 15 Juni 1940, h. 226.

³⁹ *Ibid.*, h. 227.

⁴⁰ “Lagi Ir. Soekarno”, *BNO*, No 17 tahun 09, 1 Juli 1940, h. 243.

⁴¹ *Ibid.*

bacaan. Soekarno yang gemar melahap buku menelan mentah buku bacaan. Tragisnya buku-buku itu tidak memberikan informasi yang tepat tentang mengapa Turki memisahkan agama dari negara.⁴² Soekarno tidak memiliki kemampuan *tabayun* terhadap buku bacaannya.

BNO mempertanyakan pandangan Soekarno yang menganggap pemerintahan negara Islam merupakan pemerintahan yang tidak demokratis karena kebijakan negara hanya mengakomodir kepentingan umat Islam. Kepentingan umat non-Islam tidak diakomodir. Bahkan, negara berupaya membatasi umat non-Islam. *BNO* mendeskripsikan pandangan Soekarno tersebut dengan ungkapan, “sayang! ya sayang. Soekarno terlalu rendah memandang saudaranya yang beragama Islam.”⁴³ Selanjutnya *BNO* memberikan jaminan kepada umat non-Islam bahwa “menurut hukum Islam tidak dilarang masing-masing umat menjalankan keharusan agamanya.”⁴⁴ Semua agama mempunyai kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinannya. Ini disebabkan Islam Indonesia adalah Islam yang toleran terhadap agama dan kepercayaan lain.

Desember 1939 diselenggarakan Kongres Rakyat Indonesia yang diprakarsai MIAI, GAPI, dan PVNP. Dalam kongres tersebut tidak terdengar tuntutan terbentuknya parlemen Islam, meskipun Islam Indonesia merupakan mayoritas. “Bahkan, di kala membicarakan bendera persatuan, tidak ada yang mengemukakan tuntutan supaya bendera itu bendera... Islam”.⁴⁵ Demi persatuan nasional, Islam Indonesia mengabaikan keinginan politis sepihak. Fakta politik inilah yang dilupakan Soekarno ketika berpandangan bahwa negara Islam adalah negara yang tidak demokratis. Namun, tidak adanya tuntutan pembentukan parlemen Islam bukan berarti cita-cita membentuk negara Islam memudar sekaligus menyetujui pemisahan agama dari negara. Umat Islam “sampai mati tidak akan melepaskan hidup di dalam masyarakat

⁴² “Soekarno Berdustakah atau Menjadi Korban Bukunya”, *BNO*, No. 20 tahun 09, 15 Agustus 1940, h. 279.

⁴³ “Ir. Soekarno Harus Diperhatikan”, *BNO*, No. 20 tahun 09, 15 Agustus 1940, h. 277.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

islamiyah yang luas dan lapang.”⁴⁶

Nabi Muhammad memang bukan diutus untuk mendirikan negara Islam. Tetapi, Islam yang didakwahkan Nabi Muhammad mencakup peraturan yang berdimensi agama dan dunia. Pendirian negara Islam didasarkan atas totalitas Islam dalam segala aspek kehidupan manusia. Seperti definisi pada umumnya, Islam adalah “sekumpulan undang-undang dari Tuhan yang menyusun dan memimpin manusia menuju arah kebajikan dan kepentingannya di dalam peri-kehidupan dan peri-keakhiratannya.”⁴⁷ Karena itu, pemisahan agama dari negara hanya menimbulkan kekacauan dalam kehidupan. Negara Islam harus diperjuangkan. Sebab, “*syara’* Islam tidak kurap cukup menanggung keselamatan staat dan kemaslahatan rakyatnya”.⁴⁸

Secara perundangan, *wet* (undang-undang) *staat* Islam berdasarkan al-Qur’an, sunnah dan ijtihad. Ketiga sumber hukum tersebut dapat menyelesaikan segala masalah serta membawa negara mencapai kemajuan. Dua sumber hukum pertama, al-Qur’an dan sunnah “hanya menentukan dasar-dasar saja dan bahwa hanya urusan yang terpenting saja yang ditentukan.”⁴⁹ Sedangkan ijtihad ditempatkan untuk mengimplementasikan dasar negara Islam yang ditetapkan al-Qur’an dan sunnah. Ijtihad bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sebab, di manapun terdapat *mashlahah* (kebaikan bersama), maka itulah *syara’* Islam.⁵⁰ Sebuah pemikiran yang sangat moderat.

Bagi Soekarno cita-cita negara Islam tidak lebih dari sekadar khayalan belaka. Sebab, penduduk Indonesia terdiri dari pelbagai agama; tidak hanya Islam. Dengan fakta seperti itu, apakah mereka yang tidak beragama Islam dipaksa mengikuti sebuah negara yang ber hukum Islam.⁵¹ BNO menyerang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ “Jangan Bicara Kalau tak Tahu”, *BNO*, No. 15 tahun 09, 1 Juli 1940, h. 201.

⁴⁸ “Memudahkan Faham Fiqh Islam dan Staat Islam”, *BNO*, No. 23 tahun 09, 1 Oktober 1940, h. 323.

⁴⁹ “Memudahkan Faham Fiqh dan Pemerintahan Islam II”, *BNO*, No. 24 tahun 09, 15 Oktober 1940, h. 336.

⁵⁰ “Memudahkan Faham Fiqh Islam dan Staat Islam”, *BNO*, No. 23 tahun 09, 1 Oktober 1940, h. 323.

⁵¹ Soekarno, “Saya Kurang Dinamis”, dalam Soekarno, *Di Bawah*, h. 450.

balik sekaligus mempertanyakan sekularisme yang dicita-citakan Soekarno. Dengan lugas BNO menuliskan, “Sekarang baik pun tuan maupun kami sama di atas awan cita-cita, tapi tuang minta hidup dan kita disuruh mati”.⁵²

Imaji Soekarno perihal negara Islam direspons *BNO* dengan karikaturis sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno mengira-girkan cara berlakunya cita-cita umat Islam yang menginginkan staat Islam itu begini:
2. Ada malaikat turun dari langit menuju rumah kiai *totok*.
3. Dengan kekuatan malaikat ini si kiai merencanakan satu *grondwet* (perundang-undangan, *pen*). Untuk Indonesia Soekarno khawatir kalau kiai ini menuliskan di dalam pasal satu atau pasal duanya *staat* Indonesia adalah *staat* Islam.
4. Saudara kita orang Bali dipanggil oleh kiai kita di atas, ditanya: mau terima ataukah tidak? Kalau tidak, inilah...*bemmm* senapan kiai bertendum!
5. Sesudah *grondwet* itu beres! Dan musuh-musuhnya sudah dihabis dibedil semuanya, yang mana, itu *grondwet* itu tidak berbeda jauh dari *Minhajul Qawim* atau *syarah Zubad* (dua kitab kuning yang dikaji di pesantren, *pen*). Dalam mana dipaparkan sampai terang...najis *mugholadhoh*, najis *mukhofafah*, dan bagaimana garu dan kemenyan dan mana *afdhoh*: shodaqoh atau mistik, model korban minister-minister dan jubah qadli, dan tidak dilupakan “kewajibannya” *agha-agma* (penjaga *harim*) dan cara-cara memandikan dan mengafankan... Soekarno. Kiai perancang *grondwet* “ultra modern” itu lalu undang kiai-kiai *totok* sahabatnya buat dinobatkan menjadi khalifah dan beberapa orang yang menjadi wazirnya.
6. Sesudah masing-masing duduk di jabatannya, rencana mulai diatur! Toko-toko mesti ditutup, sebab semuanya itu melupakan manusia pada *dzikrullah*. Tampar-tampar pandu diganti tasbih, trompetnya digantikan siwak dan tidak boleh dilupakan tiap-tiap stasiun *spoor*; mesti sedia pendupaan tiap-tiap *spoor* datang mesti dikemenyani, dan dibacakan *hizbulbahar* untuk keselamatannya *enz enz*.

⁵² *BNO*, No. 20 tahun 09, 15 Agustus 1940, h. 278.

7. Itulah *staat* Islam, kata Soekarno!⁵³

8. Sekularisme Soekarno dan pendapatnya minor perihal negara Islam dianggap merugikan dan melecehkan Islam. Karena itu, Soekarno harus bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar.⁵⁴

Memilih Soekarno

Muktamar (dulu, Kongres) NU ke-15 diadakan di Surabaya, 10-15 Dzulqā'dah 1359 H / 9-15 Desember 1940. Beberapa bulan setelah polemik negara Islam. Muktamar NU ke-15 merupakan muktamar yang dihelat di Surabaya untuk keempat kalinya setelah Muktamar ke-1 (1926), ke-2 (1927), dan ke-3 (1928).

Sebagaimana lazimnya muktamar NU, KH. Hasyim Asy'ari menyampaikan *khutbah iftitah* dalam bahasa Arab. Dalam *khutbah iftitah*-nya, Hadratus Syaikh mengugah tanggungjawab umat Islam terhadap dampak perang di Eropa terhadap umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia yang tidak bisa kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji. Hadratussyaikh juga menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya serangan verbal terhadap umat Islam. Propaganda dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad yang dilakukan oleh beberapa media dan melalui mimbar orasi membuat Kiai Hasyim dan NU mendesak penguasa kolonial membuat sebuah pasal peraturan yang bisa menangani segala bentuk penistaan agama. Meskipun tidak digubris oleh penguasa, namun Kiai Hasyim mengajak muktamirin agar memohon kepada Allah SWT agar Dia menguatkan semangat kaum muslimin dalam perjuangannya.⁵⁵

Muktamar NU ke-15 berlansung dinamis. Hal itu bisa dibaca dari *verslag* (laporan) muktamar yang diadakan di akhir kekuasaan Hindia Belanda. *Verslag* muktamar hanya memuat 18 persoalan keagamaan dan 35 keputusan yang ditetapkan *Hoofdbestuur* NU. Dalam pengantar *verslag* disebutkan tidak semua keputusan yang terdapat dalam muktamar ditulis

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ “Boleh Maki... Asal Tobat”, *BNO*, 21 tahun 09, 1 September 1940, h. 303.

⁵⁵ <http://www.muktamarnu.com/khotbah-iftitah-hadratussyaikh-pada-muktamar-di-surabaya.html> diakses tanggal 20 Juli 2016.

dalam *verslag* karena beberapa hal yang tidak dapat bisa disebutkan.

Salah satu keputusan muktamar yang tidak dimuat dalam *verslag* tersebut adalah perihal orang yang kompeten menjadi presiden untuk negara yang akan merdeka. Persoalan ini dibahas oleh 11 kiai tekemuka NU. Rapat tertutup tersebut diadakan di Praban Surabaya dengan dipimpin langsung Ketua Tanfidziyah NU, KH. Machfoedz Shiddiq. Peserta rapat mengajukan dua nama: Soekarno dan Hatta. Soekarno mendapat 10 suara dan Hatta memperoleh 1 suara.⁵⁶

Keputusan tersebut diambil setelah polemik negara Islam dan pelbagai hujatan serta kecaman NU ditujukan kepada Soekarno. Hatta, salah satu dari dari dua nama yang diajukan para kiai NU, mempunyai hubungan genealogis dengan ulama dan organisasi Islam. Kakek Hatta, Syaikh Abdurrahman merupakan seorang ulama yang mengembangkan Tarekat Naqsabandiyah. Kampung Hatta, Minangkabau lebih menampilkan kampung agamis. Sebaliknya, Soekarno, meskipun pernah menjadi anggota persyarikatan Muhammadiyah, dipandang *BNO* sebagai orang yang tidak memahami Islam dan mempunyai citra diri nasionalis yang tidak ‘peduli’ kepada agama.

Sekalipun mengecam pemisahan agama dari negara Soekarno, Muktamar NU ke-15 memutuskan Soekarno sebagai orang yang mempunyai kapabilitas menjadi presiden Indonesia. Apakah keputusan tersebut tidak kontradiktif dan terkesan inkonsisten? Setiap tindakan politik NU dilandasi atas pemikiran politik yang disandarkan dua referensi: al-Mawardi (w. 1058) dan al-Ghazali (w.1111).⁵⁷

Al-Mawardi merupakan teoritikus politik Islam bermazhab Shafi’iyah. Hakim di sejumlah wilayah dalam kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Karir tertingginya sebagai *Qadli al-Qudlat*. Pemikiran politiknya termaktub dalam karya tulisnya, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Sebagai birokrat kerajaan, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* dianggap upaya intelektual pelanggaran kekuasaan

⁵⁶Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab* (Bandung: Percetakan Baru, t.t), h. 25.

⁵⁷Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998)

Daulah Abbasiyah yang mendapatkan ancaman rongrongan kekuasaan Daulah Buwaihiyah.

Ulama lain yang dijadikan landasan adalah al-Ghazali. *H{ujjah al-Islam* ini sebetulnya tidak memusatkan perhatian persoalan politik. Perjalanan intelektualnya sangat mengesankan; dari ahli fikih selanjutnya filsuf dan teolog hingga sufi. Pemikiran politik al-Ghazali berserakan dalam karyanya, antara lain: *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, *Nashihat al-Mulk* dan *Kimiyau al-Sa'adah*.

Din Syamsuddin mengklasifikasikan dua pemikir politik Sunni tersebut di atas dalam kategori pemikir yang memiliki paradigma agama dan negara berhubungan secara simbolik.⁵⁸ Seperti dideskripsikan, *BNO* berpandangan agama dan negara tidak bisa dipisahkan, meskipun berbeda. Agama membutuhkan kekuasaan politik negara dengan tujuan terjamin pelaksanaan kewajiban keagamaan. Demikian pula, negara membutuhkan agama karena agama memberikan bimbingan moral dan etis kekuasaan politik negara. Pemisahan agama dari negara hanya menimbulkan *mafsadah* bagi agama sekaligus negara.

Al-Mawardi menegaskan kekuasaan politik (*imamah*) ber hukum *fardh kifayah*. Kekuasaan politik (*imamah*) merupakan pranata politik yang bertujuan melanjutkan fungsi kenabian dalam rangka memelihara agama dan dunia.⁵⁹ Agama dan dunia, termasuk negara mempunyai hubungan simbiotik. al-Ghazali memandang eksistensi kekuasaan politik (*imamah*) yang disandarkan kepada dalil *naqli* dan ditandaskan dengan dalil akal.⁶⁰ Agama dan kekuasaan politik (*imamah*) adalah sesuatu yang berbeda. al-Ghazali menyebut agama dan kekuasaan politik (*imamah*) dengan istilah “saudara kembar yang terlahir dari rahim satu ibu (*tawaman*).⁶¹

Al-Mawardi menentukan syarat orang yang memiliki kepatutan menjadi pemimpin kekuasaan politik, antara lain: adil, berpengetahuan

⁵⁸ Din Syamsuddin, “Usaha Mencari Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam” dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 47.

⁵⁹ al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 5.

⁶⁰ al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), h. 148.

⁶¹ *Ibid.*

luas, sehat jasmani, tidak memiliki cacat tubuh yang menghalanginya menjalankan roda pemerintahan, mampu memunculkan ide cemerlang, memiliki keberanian, dan mempunyai garis genealogis dengan Qurays.⁶² al-Mawardi memandang point terakhir diperdebatkan. al-Ghazali menetapkan kriteria pemimpin dengan syarat: memiliki kapabilitas, cerdas dan *wara*.⁶³

Kualifikasi pemimpin yang disyaratkan al-Mawardi dan al-Ghazali tidak menyinggung sama sekali perihal keberagaman seseorang. Bahkan, al-Mawardi dan al-Ghazali tidak ‘peduli’ dengan agama seseorang. Bila kualifikasi tersebut diaplikasikan, dua nama yang diajukan dalam rapat terbatas Mukhtar NU ke-15, Soekarno dipandang lebih tepat dibandingkan Hatta. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, Soekarno adalah momok bagi kolonial. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap Hindia Belanda. Bersama dengan kawan-kawan seperjuangan mendirikan PNI tahun 1927 yang menuntut kemerdekaan bagi Indonesia. Akibatnya, Soekarno ditangkap dan ditahan di Sukamiskin (1929). Tahun 1939, Soekarno ditangkap lagi karena menebarkan risalah *Mencapai Indonesia Merdeka*. BNO pun merasa kagum dengan Soekarno, “pemimpin yang gagah perkasa, terkenal ahli pidato, ahli pengarang, ahli organisasi...”⁶⁴

Keputusan Mukhtar NU ke-15 tersebut mengesankan sikap oportunistik NU sebagaimana dialamatkan banyak cendekiawan.⁶⁵ Di satu sisi, menolak pandangan sekularistik Soekarno yang memang berlawanan secara diametral dengan orientasi keagamaan NU yang legal-formal. Di sisi lain, memutuskan Soekarno sebagai tokoh yang paling memenuhi kualifikasi presiden untuk negeri yang akan merdeka.

Namun, keputusan 11 kiai terkemuka NU itu, sebetulnya mencerminkan fleksibilitas antara pandangan keagamaan dan realitas politik. Barangkali tidak berlebihan eksistensi NU sebagai respons kreatif yang menyelaraskan

⁶² al-Mawardi, *al-Ahkam*, h. 7.

⁶³ al-Ghazali, *al-Iqtishad*, h. 149.

⁶⁴ BNO No. 20 tahun 09, 15 Agustus 1940, h. 276.

⁶⁵ Ahmad Suaedy, dkk “Pengantar Penerbit” dalam Greg Barton dan Greg Fealy (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, terj. Ahmad Suaedy, dkk (Yogyakarta:LKiS, 1997), h. vi

pandangan teologis-keagamaan dengan persoalan sosial-politik yang mendera umat Islam Indonesia tanpa kehilangan substansi Islam.⁶⁶

PENUTUP

Melalui *BNO*, dalam wacana negara Islam tahun 1940, NU menunjukkan pandangan keagamaan yang berorientasi legal-formal dengan mendukung *dar al-Islam* sekaligus menentang keras sekularisme yang dilantangkan Soekarno dan kelompoknya. Kendati demikian, dalam Mukhtamar ke-15, rapat tertutup 11 kiai terkemuka memutuskan bahwa Soekarno adalah orang yang memenuhi kualifikasi sebagai presiden. Dengan kekayaan khazanah keilmuan Islam, NU mampu mendayung antara pandangan legal-formal dan realitas politik, tanpa mengorbankan Islam. Dalam konteks inilah dapat ditarik pandangan NU tentang Pancasila yang dipersoalkan kelompok minoritas Muslim Indonesia.

⁶⁶ Abd. A'la, "NU dan Kontekstualisasi Islam dalam Lokalitas Budaya", *Makalah* tidak diterbitkan, 2003, h. 1.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung: Mizan, 2001.
- A'la, Abd., "NU dan Kontekstualisasi Islam dalam Lokalitas Budaya", Makalah tidak diterbitkan, 2003.
- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqā*., Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- Ali, Fachry, "Meneruskan Polemik Islam Soekarno" Pengantar dalam Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: Logos, 1999.
- al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Azra, Azyumardi, "Antara Kesetiaan dan Perbenturan" *Jurnal Kalam* edisi 3 1994.
- Federsiepiel, Howard M., *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam di Indonesia Abad 20*, terj. Yudian W Aswin dan Affandi Mochtar. Yogyakarta: UGM Press, 1996.
- Haidar, Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Halim, Abdul, *Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab*, Bandung: Percetakan Baru, t.t..
- Haryanti, Kahfi, *Agus Salim and Nationalist in Indonesia during Early Twenty Century*, Jakarta: Logos, 2001.
- <http://www.muktamarnu.com/khotbah-iftitah-hadratussyaikh-pada-muktamar-di-surabaya.html> diakses tanggal 20 Juli 2016.
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1994.
- Mughni, Syafiq A., *Hasan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Pangabean, Samsu Rizal, "Din, Dunya dan Daulah" dalam Taufik Abdullah, dkk (ed.). *Ensiklopedi Islam Tematis: Dinamika Masa*

Kini, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.

Ricklefs, MC. *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: UGM Press.

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I cet. III. Jakarta: Panitia Penerbit DBR, 1964.

Suaedy dkk., Ahmad, "Pengantar Penerbit" dalam Greg Barton dan Greg Fealy (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, terj. Ahmad Suaedy, dkk., Yogyakarta: LKiS, 1997.

Syamsuddin, Din, "Usaha Mencari Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam Abu Zahra (ed.). *Politik Demi Tuhan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Sumber Sejarah *Berita Nahdlatul Ulama*:

"Jangan Bicara Kalau tak Tahu", *BNO* No. 15 tahun 09, 1 Juli 1940.

"Ir. Soekarno in Actie", *BNO*, No 16 tahun 09, 15 Juni 1940.

"Lagi Ir. Soekarno", *BNO*, No 17 tahun 09, 1 Juli 1940.

"Soekarno Berdustakah atau Menjadi Korban Bukunya", *BNO*, No. 20 tahun 09, 15 Agustus 1940.

"Ir. Soekarno Harus Diperhatikan", *BNO*, No. 20 tahun 09, 15 Agustus 1940.

"Jangan Bicara Kalau tak Tahu", *BNO*, No. 15 tahun 09, 1 Juli 1940.

"Memudahkan Faham Fiqh Islam dan Staat Islam", *BNO*, No. 23 tahun 09, 1 Oktober 1940.

"Memudahkan Faham Fiqh dan Pemerintahan Islam II", *BNO*, No. 24 tahun 09, 15 Oktober 1940.

"Memudahkan Faham Fiqh Islam dan Staat Islam", *BNO*, No. 23 tahun 09, 1 Oktober 1940.

BNO, No. 20 tahun 09, 15 Agustus 1940.

"Boleh Maki... Asal Tobat", *BNO*, 21 tahun 09, 1 September 1940.